Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Oleh : Ramadona Simbolon dan Sri Elviani *)

Intisari

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah Sumatera Utara, menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara dan menganalisis dan menyusun strategi pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah di Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Secara parsial pajak daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap kemandirian fiskal, sehingga retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap kemandirian fiskal, sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah kontribusinya masih kecil terhadap APBD Propinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu perlu ditingkatkan peran BUMD dan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal Propinsi Sumatera Utara.

Kata kunci : Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan kemandirian fiskal.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebelum era reformasi harapan pemerintah daerah untuk dapat

membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan.

Yang terjadi adalah ketergantuan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Era reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Dikeluarkannya kedua UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan implikasi yang sangat mendasar yang mengarah pada perlu dilakukannya reformasi sektor publik dan dipakainya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan

untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar tercapai.

Melihat kondisi sumber penerimaan di Sumatera Utara, ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa diharapkan untuk dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan dana untuk pengeluaran daerah. Untuk menghindari persoalan dalam era desentralisasi pada masa mendatang, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan upaya-upaya yang serius dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD. Kondisi Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara ditunjukkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar 25% dari penerimaan daerah Sumatera Utara.

Sejalan hal tersebut, maka perlu dilakukan Kajian Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak menjadi bagian sumber keuangan terbesar (Koswara, 1999). Untuk meningkatkan potensi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah atau juga biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ada beberapa faktor

yang perlu diberdayakan diantaranya adalah investasi, obligasi dan PDRB perkapita. Untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah pada pelaksanaan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu barometer dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masalahnya proporsi penerimaan yang berasal dari PAD Provinsi jumlahnya kecil, sehingga terjadi ketidakseimbangan keuangan daerah (fiscal gap) antara kemampuan daerah (fiscal capacity) dan kebutuhan daerah (fiscal need).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan

*) Dosen FE UISU Medan

- pembangunan daerah Sumatera Utara.
- b. Menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara.
 - c. Menganalisis dan menyusun strategi pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah di Sumatera Utara

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif dengan hubungan kausal atau sebab akibat dan penelitian deskriptif kualitatif. Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kemandirian fiskal.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder (time series) selama periode tahun 2005 s/d 2012. Data yang diperoleh berupa data realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Total Penerimaan

Sumber data lainnya berupa buku-buku laporan tahunan beberapa terbitan seperti : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara, PDRB Sumatera Utara dan jurnal-jurnal beberapa terbitan yang dapat diperoleh diberbagai instansi.

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Data dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Data yang berbentuk tahunan diolah dalam bentuk triwulanan untuk menyeragamkan periode masing-masing variabel.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan dikombinasikan dengan metode analisis deskriptif.

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$DKF = r + {}_1PD + {}_2RD + {}_3HPKD + e$$

Keterangan :

- DKF : Derajat Kemandirian Fiskal
PD : Pajak Daerah
RD : Retribusi Daerah
HPKD : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan
r : Konstanta.
s : Koefisien Regresi.
e : Residual

Analisis Deskriptif

Selain analisis regresi berganda, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya menyusun strategi pengembangan potensi-potensi penerimaan daerah dalam meningkatkan PAD yang akan digunakan untuk pembangunan daerah.

PEMBAHASAN

Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji F menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal. Hal ini terlihat dari nilai F hitung $34,274 > 2,51$ dan signifikan karena nilai sig. sebesar

*) Dosen FE UISU Medan

0.000<0.05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber-sumber pembiayaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal tersebut dibuktikan dengan struktur APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang beberapa sumber penerimaannya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan penerimaan khususnya dari PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangannya dan menciptakan kemandirian fiskal bagi Provinsi Sumatera Utara. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu

mengalokasikan belanja sesuai dengan prioritas dan untuk pembangunan, sehingga tercipta kesempatan untuk bekerja bagi masyarakat dan meningkatkan penghasilan masyarakat serta kesejahteraan.

Pajak Daerah (X1) dan Kemandirian Fiskal (Y)

Hasil uji secara parsial dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal. Hal ini terlihat dari nilai t hitung $10,129 > 1,714$ dan signifikan karena nilai sig. sebesar $0.000 < 0.05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber yang digunakan untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jika dilihat dari nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 1,100. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian fiskal adalah positif dan signifikan yang berarti

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara. Besaran persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara rata-rata mencapai di atas 90 persen.

Berdasarkan analisis perhitungan, maka diperoleh kontribusi pajak daerah terhadap PAD sangat signifikan dengan rata-rata > 90%. Hasil estimasi antara pajak daerah dan kemandirian fiskal di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal dengan nilai t statistik pajak daerah sebesar 10,129 lebih besar dari t tabel (1,714). Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya pajak daerah, maka akan semakin meningkatkan kemandirian fiskal.

Retribusi Daerah (X2) dan Kemandirian Fiskal (Y)

Hasil uji secara parsial dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal. Hal ini terlihat dari nilai t hitung $1,326 <$ dari t tabel 1,714 dan tidak signifikan karena nilai sig. sebesar $0.198 < 0.05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dan penerimaan daerah pada APBD masih sangat kecil. Hal ini juga dapat dibuktikan dari rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 0,1 persen.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan (X3) dan Kemandirian Fiskal (Y)

Hasil uji secara parsial Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan (HPKD) dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa HPKD berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal. Hal ini terlihat dari

nilai t hitung $3,539 > 2,51$ dan signifikan karena nilai sig. sebesar $0.000 < 0.05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa HPKD merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah potensial yang dapat digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jika dilihat dari nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,251, maka kontribusi HPKD Provinsi Sumatera yang ada saat ini masih belum maksimal.

Berdasarkan analisis perhitungan, terlihat bahwa rata-rata kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan (HPKD) terhadap PAD rata-rata hanya 0,5 persen. Hal ini membuktikan bahwa kinerja BUMD belum maksimal, sehingga belum mampu untuk meningkatkan PAD secara signifikan. Hal ini tentunya membutuhkan strategi dan solusi dalam pemberdayaan BUMD, sehingga dapat meningkatkan labanya dan berkontribusi secara signifikan terhadap PAD dan menjadi salah satu sumber

utama pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Potensi Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, maka terlihat bahwa sumber-sumber penerimaan daerah saat ini hanya pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar, namun secara umum sumber-sumber penerimaan daerah tersebut yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kontribusi masing-masing variabel sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut diantaranya retribusi daerah hanya sebesar 0,1 persen, HPKD sebesar 0,5 persen, dana bagi hasil sebesar 0,1 persen, dana alokasi umum sebesar 0,1

*) Dosen FE UISU Medan

persen, dana alokasi khusus sebesar 0,1 persen, dan pendapatan lain-lain yang sah hanya sebesar 0,05 persen.

Strategi Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan analisis statistik terkait pengaruh masing-masing variabel terhadap kemandirian fiskal dan analisis secara deskriptif terhadap kelemahan-kelemahan dan belum optimalnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan solusi dan strategi dalam peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan menciptakan kemandirian fiskal. Beberapa strategi dalam peningkatan penerimaan daerah tersebut akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

Strategi Pengembangan Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan data Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Sumatera Utara terjadi peningkatan nilai masing-masing sumber penerimaan pajak daerah setiap tahunnya, khususnya untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Oleh karena itu Peningkatan penerimaan daerah dari pajak daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan potensi sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Menaikkan tarif pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya Sedan, Jeep, Station Wagon, Truck, Pick Up (Tidak Umum), Sepeda Motor, Scooter.
2. Meningkatkan penjualan kendaraan di atas air, melalui pemberdayaan pariwisata yang menggunakan

*) Dosen FE UISU Medan

kenderaan di atas air, sehingga dapat meningkatkan penjualan kenderaan di atas air, serta meningkatkan penerimaan pajak kenderaan di atas air.

Selain itu strategi peningkatan pajak juga dapat dilakukan dengan peningkatan investasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Besarnya kontribusi pajak daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap kemandirian fiskal, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan peningkatan pajak secara terus-menerus. Salah satunya adalah dengan meningkatkan investasi, dimana dalam jangka panjang investasi akan meningkatkan potensi output dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus baik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable development) atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan dalam negeri meningkat dan seterusnya, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi.

Dalam pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara diperlukan berbagai fasilitas modal. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi.

Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan penerimaan daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah. Menurut Suryaningrum (2000), sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu : (1) pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, (2) pertumbuhan yang disebabkan oleh tenaga kerja, dan (3) pertumbuhan yang disebabkan oleh perubahan dalam produktivitas (Suryaningrum, 2000). Dengan demikian investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian daerah relatif terhadap

daerah lainnya juga penting terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan (KPPOD, 2003). Memang bukan hal yang mudah untuk menarik investasi masuk ke suatu daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan infrastruktur (listrik, air, jalan, pelabuhan, dan sebagainya), kondisi geografis daerah, pengalaman daerah dalam mengurus investasi serta kemauan yang keras dari pemerintah daerah untuk menarik investor yang ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan mendorong masuknya investasi ke daerah, disamping juga kesiapan dari masyarakat setempat untuk menerima masuknya investasi ke daerah tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut cukup kondusif, niscaya perkembangan investasi akan membaik dan investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Untuk

meningkatkan peluang berinvestasi di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu adanya suatu strategi dari pemerintah daerah berupa reformasi mendasar berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi, yaitu :

1. Reformasi pelayanan investasi. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah memberikan peran pemerintah daerah dalam hal prosedur aplikasi dengan terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapa persetujuan, perizinan dan restu BKPMD untuk tahap awal diantaranya (JETRO, 2003).
2. Koordinasi antar tingkat pemerintah baik vertikal maupun horizontal. Beberapa pemerintah daerah telah menerapkan sistem Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dalam pelayanan perizinan. Sistem ini ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan. Beberapa pemerintah daerah telah menerapkan Sistem Perizinan Satu Atap (SINTAP). Hal ini diperlukan karena dengan

menciptakan pelayanan perizinan dan investasi maka permohonan perizinan dapat diproses di satu tempat sehingga birokrasi menjadi lebih pendek, cepat dan efisien.

3. Tiga hal utama yang diinginkan investor, yaitu : (1) penyederhanaan sistem perizinan; (2) penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih; (3) transparansi biaya perizinan.
4. Reformasi peraturan dapat dimulai oleh pemerintah daerah

Strategi Pengembangan Retribusi Daerah

Berdasarkan data Jumlah sumber penerimaan retribusi daerah yang ada terjadi peningkatan nilai masing-masing sumber penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya, khususnya untuk retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Oleh karena itu Peningkatan penerimaan daerah dari retribusi daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam

*) Dosen FE UISU Medan

meningkatkan potensi sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur pajak dan retribusi daerah, melalui :
 - a. Pelayanan prima dalam artian bahwa waktu dan tempat harus jelas serta sikap yang ramah dari petugas pajak itu sendiri. Untuk tahap awal bisa dibentuk seperti KP2T untuk pajak dan retribusi daerah, dimana masyarakat hanya pergi ke satu tempat untuk melakukan pembayaran.
 - b. Sistem jemput bola oleh petugas pajak. karena masih belum efektifnya sistem yang ada, maka pemerintah daerah dapat secara langsung mendatangi wajib pajak yang ada.

2. Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan pajak baik terhadap wajib pajak maupun petugas pajak. Untuk wajib pajak harus ada kontrol dari pemerintah daerah terhadap nota penjualan. Sedangkan untuk petugas harus ada peningkatan Pengawasan Melekat (Waskat) dari atasan kepada bawahan. Bagi retribusi yang menggunakan karcis dapat dilakukan dengan cara stop opname karcis agar jelas antara penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun. Selain itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membenahi peraturan-peraturan daerah terkait dengan berbagai jenis pungutan pajak maupun retribusi.
- b. Perlu meminta masukan yang kepada masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah agar masyarakat tidak terbebani.

*) Dosen FE UISU Medan

- c. Peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini bisa berupa pemberian pelatihan bagi petugas pajak (pembinaan tersebut dilakukan oleh atasan).

Strategi Pengembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan (HPKD)

Berdasarkan data Jumlah sumber penerimaan HPKD yang ada terlihat bahwa penerimaan HPKD yang ada di Provinsi Sumatera Utara, masih belum signifikan. Hal itu terlihat dari kontribusi HPKD belum signifikan terhadap PAD. Peningkatan penerimaan dari HPKD dapat dilakukan dengan berbagai langkah dan tindakan yang sifatnya strategis dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan BUMD yang kinerjanya baik seperti PT Bank

Sumut. Sumber HPKD terbesar adalah penerimaan dari PT Bank Sumut, dimana pada Tahun 2011 dan 2012 mencapai Rp 200 milyaran. Jika seluruh BUMD yang ada di Provinsi Sumatera Utara memiliki kinerja seperti PT Bank Sumut, maka penerimaan HPKD dari seluruh BUMD akan mencapai trilyunan rupiah. Hal ini akan meningkatkan kontribusi HPKD terhadap PAD secara signifikan.

2. Membentuk Undang-Undang tentang BUMD, setelah dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang BUMD, sehingga BUMD memiliki payung hukum yang jelas dalam melaksanakan operasionalnya dan dalam Undang-Undang tersebut, BUMD harus memiliki kebebasan dalam mengembangkan operasinya serta jenis usahanya.
3. Meningkatkan ataupun menghentikan BUMD yang kinerjanya buruk, karena hanya

*) Dosen FE UISU Medan

akan menambah beban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang dapat digantikan BUMD yang baru dengan bidang usaha yang dapat menghasilkan laba cukup besar, seperti dalam bidang konstruksi maupun bidang jasa tol dan lainnya.

4. Menempatkan orang-orang yang profesional yang memiliki skill dan kompetensi sesuai bidang usaha BUMD yang digarap. Selain itu peningkatan kompetensi dan profesionalisme direksi beserta stafnya dalam menjalankan perusahaan sebagai usaha komersial murni yang mengutamakan pertimbangan efisiensi dan pencapaian laba usaha yang memadai. Direksi dan staf yang ditempatkan di BUMD haruslah orang-orang yang mempunyai jiwa dan semangat wiraswasta/entrepreneurship dalam menjalankan operasional usaha.

5. Pemberian wewenang dan pendelegasian kebijakan yang lebih besar dan luas oleh pimpinan daerah kepada BUMD dalam operasionalnya. BUMD tidak boleh dijadikan sapi perah atau kereta politik bagi kepentingan birokrat maupun partai politik. Hal ini harus sejalan dengan tujuan BUMD tersebut didirikan adalah tetap profit oriented untuk menambah PAD.
6. Mengatasi kelemahan internal dengan penetapan kembali core bisnis, likuidasi unit usaha yang selalu merugi. Memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi teknik produksi baru yang lebih efisien dan efektif serta memperbaiki koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir. Memaksimalkan peluang eksternal berupa upaya kerjasama

*) Dosen FE UISU Medan

yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan. Bentuk kerja sama bisa berupa joint venture atau bentuk kerja sama lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Utara, dimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara dan total penerimaan APBD yang cukup signifikan.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Utara, hal ini terlihat dari kontribusi retribusi daerah yang tidak signifikan

terhadap PAD dan penerimaan daerah dalam APBD.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) berpengaruh terhadap kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Utara, namun kontribusinya terhadap PAD dan total penerimaan daerah masih sangat kecil.
4. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara masih bertumpu pada pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dimana sumber-sumber penerimaan daerah Provinsi Sumatera Utara belum optimal sehingga belum dapat menciptakan kemandirian fiskal.

*) Dosen FE UISU Medan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bachrul Elmi, 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia. UI Press, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2011. Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2011.
- Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas. 2008. KPS Kemitraan Prasarana dan Sarana. Mengamankan Investasi Jalan tol.
- Fabozzi, F., 2004. Bond Market, Analysis and Strategies. 5th eds.; Prentice Hall International Editions.
- Fong, H. Gifford and F. J. Fabozzi, 1985. Fixed Income Portfolio Management. Dow Jones, Irwin, Illinois, USA.
- Fabozzi, F.J., Martellini, L. And Philippe Priaulet, 2006. Advanced Bond Portfolio Management: Best Practices in Modelling and Strategies. John Wiley and Sons Inc.
- Kementerian Keuangan RI, 2008. Buku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
- Kementerian Keuangan RI, 2009. Permenkeu No.171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009. Laporan Penelitian Mekanisme dan Penggunaan DAK, Lembaga Penelitian Smeru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

*) Dosen FE UISU Medan

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah.

UNDP. 1997. Developing Capacity For Effective Governance. Workshop for UNDP Country Offices.

UU Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU Nomor 1, Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

*) Dosen FE UISU Medan